

RENCANA ANGGARAN BIAYA REVISI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2023
UNTUK PPIID

SATKER : (686218) Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

NO.KODE	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/RO/ KOMPONEN INPUT	RINCIAN VOLUME KEGIATAN						VOLUME KEGIATAN	BIAYA SATUAN	JUMLAH
115.WA										
4356	PENGLOLAAN DATA DAN INFORMASI									16.895.000
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal									16.895.000
4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu									11.160.000
301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota									11.160.000
A)	Tanpa Sub Komponen									11.160.000
521211	Belanja Bahan									3.480.000
	- Rapat Koordinasi Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik									1.490.000
	Fotocopy/ Penggandaan	1 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K		1 pkt	160.000	160.000
	Komputer Supply	1 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K		1 pkt	160.000	160.000
	Konsumsi dan snack	1 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K	x 26 Org	26 pkt	45.000	1.170.000
	- Rapat Kerja Konferensi Pers									1.990.000
	Fotocopy/ Penggandaan	2 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K		2 pkt	160.000	320.000
	Komputer Supply	2 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K		2 pkt	160.000	320.000
	Konsumsi dan snack	2 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K	x 15 Org	30 pkt	45.000	1.350.000
522151	Belanja Jasa Profesi									1.800.000
	- Podcas/ Talkshow Kehumasan di Kantor									1.800.000
	Pejabat Eselon III (external)	2 Kali	x	1 Jam	x	1 Org	x 1 K/K	2 OJ	900.000	1.800.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									4.680.000
	- Undangan dalam rangka rapat koordinasi kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik ke Provinsi									4.680.000
	Transport Provinsi - Kab/Kota	1 Kali	x	3 Org	x	1 K/K		3 OK	250.000	750.000
	Uang Harian	1 Kali	x	3 Org	x	1 K/K	x 2 Hr	6 OH	380.000	2.280.000
	Penginapan	1 Kali	x	3 Org	x	1 K/K	x 1 Hr	3 OH	550.000	1.650.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									1.200.000
	- Perjalanan dinas dalam rangka peliputan									1.200.000
	Transport	2 Kali	x	2 Org	x	1 K/K		4 OK	150.000	600.000
	Uang Harian	1 Kali	x	2 Org	x	1 K/K		2 OH	150.000	300.000
	- Podcas/ Talkshow Kehumasan di Kantor									300.000
	Transport Narsum	2 Kali	x	1 Org	x	1 K/K		2 OK	150.000	300.000
4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi									5.735.000
301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota									5.735.000
A)	Tanpa Sub Komponen									5.735.000
521211	Belanja Bahan									455.000
	- Rapat di Kantor penyusunan laporan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota									455.000
	Fotocopy/ Penggandaan	1 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K		1 pkt	100.000	100.000
	Komputer Supply	1 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K		1 pkt	100.000	100.000
	Snack	1 Kali	x	1 Pkt	x	1 K/K	x 15 Org	15 pkt	17.000	255.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa									4.680.000
	- Koordinasi/Konsultasi/ Kementrian/ Lembaga/ Instansi Pemerintah/ Undangan (ke Provinsi)									4.680.000
	Transport Provinsi - Kab/Kota	1 Kali	x	3 Org	x	1 K/K		3 OK	250.000	750.000
	Uang Harian	1 Kali	x	3 Org	x	1 K/K	x 2 Hr	6 OH	380.000	2.280.000
	Penginapan	1 Kali	x	3 Org	x	1 K/K	x 1 Hr	3 OH	550.000	1.650.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota									600.000
	- Koordinasi/Konsultasi/ Undangan/ Pelaporan dalam Kota									600.000
	Uang Harian	2 Kali	x	1 Org	x	1 K/K		2 OH	150.000	300.000
	Transport	2 Kali	x	1 Org	x	1 K/K		2 OK	150.000	300.000

Padang, September 2023
BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN

YONI SYAH PUTRI, S.H
NIP. 19870821 201902 2 001

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				#REF!	
PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				#REF!	
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		40	Layanan, Bidang, Dokumen,	#REF!	
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		40	Layanan, Bidang, Dokumen,	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan	#REF!	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran
Provinsi		202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	#REF!	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses
kab/kota		301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	19	Laporan	#REF!	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
kab/kota		302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	19	Laporan	#REF!	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
	5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	#REF!	
RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	#REF!	34 provinsi +18 satker K/K baru
	5245.BKC	Pemantauan Lembaga		100	Laporan	#REF!	
	5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		100	Laporan	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	#REF!	1 laporan@34 provinsi
Provinsi		202 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan	#REF!	-laporan semester
Provinsi		203 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	#REF!	
Provinsi		204 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan	#REF!	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan
Provinsi		205 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemilikan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemilikan kepada disabilitas	1	Laporan	#REF!	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)
kab/kota		301 Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	19	Laporan	#REF!	1 laporan@514 KK
kab/kota		302 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	19	Laporan	#REF!	-laporan semester
kab/kota		303 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	19	Laporan	#REF!	
kab/kota		304 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	19	Laporan	#REF!	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan
kab/kota		305 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemilikan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemilikan kepada disabilitas	19	Laporan	#REF!	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) -1 laporan@514 KK
	6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				#REF!	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)

	6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		2.094	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
	6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		858	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	#REF!	
Provinsi		202 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	#REF!	
Provinsi		203 Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu	4	Laporan	#REF!	
Provinsi		204 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	#REF!	
Provinsi		205 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	#REF!	
Provinsi		206 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	#REF!	
Provinsi		207 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan	#REF!	Laporan triwulan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi
Provinsi		208 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)		4	Laporan	#REF!	Laporan triwulan kegiatan Ketua Provinsi
Kabupaten/Kota		301 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	19	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		302 Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	38	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu	76	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		304 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	38	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		305 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	76	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		306 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	76	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		307 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	76	Laporan	#REF!	Laporan triwulan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi Kab/Kota
Kabupaten/Kota		308 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		76	Laporan	#REF!	Laporan triwulan kegiatan Ketua Kab/Kota
Kecamatan		401 Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawasan pemilu	179	Laporan	#REF!	
Kecamatan		402 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	179	Laporan	#REF!	Laporan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi Kecamatan
	6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		1.236	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
		Komponen Input :					
Kecamatan		401 Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	1 x kel/desa	Daerah	#REF!	
	6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		158	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	#REF!	
	6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		158	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		6	Unit	#REF!	
Kabupaten/Kota		301 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		152	Unit	#REF!	

	6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU				#REF!	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		20	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
	6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		20	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	19	Laporan	#REF!	
	6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC				#REF!	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		3.226	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
	6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc		1.415	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
		Komponen Input :					
Kecamatan		401 Honorarium (Kecamatan)		179	Daerah	#REF!	Ketua = 1 org x 6 bln Anggota = 2 org x 6 bln Kasek = 1 org x 6 bln Pelaksana PNS = 2 org x 6 bln Pelaksana Non PNS = 3 org x 6 bln Tenaga pendukung = 2 org x 6 bln
Kelurahan/Desa		501 Honorarium (Kelurahan/Desa)		1.236	Orang	#REF!	8 bulan
	6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc		1.811	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
		Komponen Input :					
Kabupaten/Kota		301 Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)		19	Lembaga	#REF!	(Ketua + Anggota + Kasek) x 12 bulan
Kabupaten/Kota		302 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)		19	Lembaga	#REF!	Sewa Kantor/Ruang Sidang/Gakkumdu = 12 bulan
Kecamatan		402 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)		179	Daerah	#REF!	6 bulan
Kecamatan		403 Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)		179	Daerah	#REF!	6 bulan
Kecamatan		404 Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)		179	Daerah	#REF!	6 bulan
Kelurahan/Desa		502 Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)		1.236	Orang	#REF!	
	6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				#REF!	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1.475	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
	6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih		1.475	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	#REF!	
Provinsi		202 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan	#REF!	
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	19	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	19	Laporan	#REF!	

Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	19	Laporan	#REF!	
Kecamatan		401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	179	Laporan	#REF!	
Kelurahan/Desa		501	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1.236	Laporan	#REF!	
	6839.QCE		Penanganan Perkara		20	Perkara, Berkas Perkara	#REF!	
	6839.QCE.001		Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		20	Perkara, Berkas Perkara	#REF!	
			Komponen Input :					
Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	#REF!	
Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	19	Perkara	#REF!	
	6840		PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU				#REF!	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6840.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		60	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
	6840.QIC.001		Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu		60	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	#REF!	
Provinsi		202	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	1	Laporan	#REF!	
Provinsi		203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	19	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		302	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	19	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	19	Laporan	#REF!	
	6840.QCE		Penanganan Perkara		60	Perkara, Berkas Perkara	#REF!	
	6840.QCE.001		Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu		60	Perkara, Berkas Perkara	#REF!	
			Komponen Input :					
Provinsi		201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	#REF!	
Provinsi		202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	#REF!	
Provinsi		203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	#REF!	
Kabupaten/Kota		301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	19	Berkas Perkara	#REF!	
Kabupaten/Kota		302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	19	Perkara	#REF!	
Kabupaten/Kota		303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	19	Perkara	#REF!	
	6841		PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN				#REF!	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6841.QIC		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		40	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	

	6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		40	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	#REF!	
Provinsi		202 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	19	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	19	Laporan	#REF!	
	6841.QCE	Penanganan Perkara		20	Perkara, Berkas Perkara	#REF!	
	6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		20	Perkara, Berkas Perkara	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	#REF!	
Kabupaten/Kota		301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	19	Perkara	#REF!	
	6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA				#REF!	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		239	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
	6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		239	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	#REF!	
Provinsi		202 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	1	Laporan	#REF!	
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	19	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	19	Laporan	#REF!	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	19	Laporan	#REF!	
Kecamatan		401 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	179	Laporan	#REF!	
	6842.QCE	Penanganan Perkara		60	Perkara, Berkas Perkara	#REF!	
	6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		60	Perkara, Berkas Perkara	#REF!	
		Komponen Input :					

Provinsi	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	#REF!	
Provinsi	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	#REF!	
Provinsi	203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	#REF!	
Kabupaten/Kota	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	19	Berkas Perkara	#REF!	
Kabupaten/Kota	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	19	Perkara	#REF!	
Kabupaten/Kota	303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	19	Perkara	#REF!	
	115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				#REF!	
	6849	PENGLOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				#REF!	
	6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		60	Layanan, Laporan, Dokumen	#REF!	
	6849.EBA.956	Layanan BMN		20	Layanan, Laporan, Dokumen	#REF!	
		<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi	201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	#REF!	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota
Kab/kota	301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	19	Laporan	#REF!	Semesteran
	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		40	Layanan, Laporan, Dokumen	#REF!	
		<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi/Kab/kota	001	Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	20	Layanan	#REF!	
Provinsi/Kab/kota	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	20	Layanan	#REF!	
	6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		230	Unit, M2, Paket	#REF!	
	6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal		228	Unit, M2, Paket	#REF!	
		<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi	202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	3	Unit	#REF!	
Provinsi	203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	35	Unit	#REF!	
Kab/kota	302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	76	Unit	#REF!	
Kab/kota	303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	114	Unit	#REF!	
	6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		2	Unit, M2, Paket	#REF!	
		<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi	201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	2	Unit	#REF!	
Kab/kota	301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		Unit	#REF!	
	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		80	Dokumen, Layanan, Laporan	#REF!	
	6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		20	Dokumen, Layanan, Laporan	#REF!	
		<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi	201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	#REF!	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran
Kab/kota	301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	19	Dokumen	#REF!	

	6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		20	Dokumen, Layanan, Laporan	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi	201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	#REF!	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota
Kab/kota	301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	19	Dokumen	#REF!	
	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		20	Dokumen, Layanan, Laporan	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi	201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	#REF!	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran
Kab/kota	301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	19	Dokumen	#REF!	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan
	6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		20	Dokumen, Layanan, Laporan	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi	201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	#REF!	
Kab/kota	301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	19	Dokumen	#REF!	
	6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM				#REF!	
	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		64	Layanan, Laporan, Dokumen	#REF!	
	6850.EBA.957	Layanan Hukum		41	Layanan, Laporan, Dokumen	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi	201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	#REF!	1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota
Provinsi	202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	#REF!	
Provinsi	203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan	#REF!	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
Kab/kota	301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	19	Laporan	#REF!	
Kab/kota	302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	19	Laporan	#REF!	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
	6850.EBA.962	Layanan Umum		2	Layanan, Laporan, Dokumen	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi	201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		1	Laporan	#REF!	Kegiatan Ketua Provinsi
Kab/kota	301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Laporan	#REF!	Kegiatan Ketua Kab/Kota
	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum		21	Layanan, Laporan, Dokumen	#REF!	
		Komponen Input :					
Provinsi	201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	#REF!	
Provinsi	202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	#REF!	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum
Kab/kota	301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	19	Laporan	#REF!	Hanya paket jasa konsultan (advokat)
	6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		20	Orang, Layanan	#REF!	
	6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM		20	Orang, Layanan	#REF!	
		Komponen Input :					

Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	1	Orang	#REF!	Seluruh pegawai provinsi
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	19	Orang	#REF!	Seluruh pegawai kabupaten/kota
	4355		PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				#REF!	
	4355.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal		20	Dokumen, Layanan, Laporan	#REF!	
	4355.EBD.961		Layanan Reformasi Kinerja		20	Dokumen, Layanan, Laporan	#REF!	
			<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi		201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen	#REF!	
Kab/kota		301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	19	Dokumen	#REF!	
	4356		PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				#REF!	
	4356.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal		40	Layanan, Laporan, Dokumen	#REF!	
	4356.EBA.958		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		20	Layanan, Laporan, Dokumen	#REF!	
			<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi		201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	#REF!	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota
Kab/kota		301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	19	Laporan	#REF!	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota
	4356.EBA.963		Layanan Data dan Informasi		20	Layanan, Laporan, Dokumen	#REF!	
			<i>Komponen Input :</i>					
Provinsi		201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	#REF!	1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota
Kab/kota		301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	19	Laporan	#REF!	Semester
TOTAL								#REF!

Catatan :

1. Alokasi anggaran berpedoman pada surat edaran pagu anggaran masing-masing satker;
2. Seluruh komponen input perlu di alokasikan anggarannya.